

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 181
TAHUN 2016 TENTANG PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA
PADA SATUAN KERJA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN
KLATEN**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Akuntansi

Peminatan:

Akuntansi Keuangan



Diajukan oleh:

ISWADI

NIM 2122100020

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN PSIKOLOGI
UNIVERSITAS WIDYA DHARMA
AGUSTUS 2024**

HALAMAN PERSETUJUAN

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 181
TAHUN 2016 TENTANG PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA
PADA SATUAN KERJA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN
KLATEN**

Diajukan oleh:

ISWADI

NIM. 2122100020

Telah disetujui pembimbing untuk dipertahankan di hadapan
Dewan Penguji Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Psikologi
Universitas Widya Dharma Klaten

Pada tanggal 20 Agustus 2024

Pembimbing Utama



Dr. Agung N. Jati, S.E., M.Si., M.Pd., Ak., CA.
NIDN. 0620017001

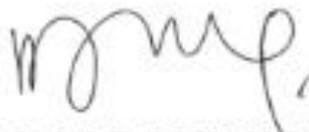
Pembimbing Pendamping



Cahaya Nugrahani, S.E., M.Si.
NIDN. 0605017702

Mengetahui:

Ketua Program Studi Akuntansi



Dr. Agung N. Jati, S.E., M.Si., M.Pd., Ak., CA.
NIDN. 0620017001

HALAMAN PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 181
TAHUN 2016 TENTANG PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA
PADA SATUAN KERJA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN
KLATEN**

Diajukan oleh:

ISWADI

NIM. 2122100020

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Skripsi Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Psikologi Universitas Widya Dharma Klaten dan diterima
untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi

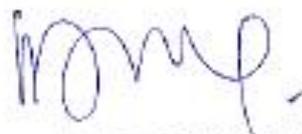
Pada tanggal 20 Agustus 2024

Ketua



Dr. Arif Julianto S.N., S.E., M.Si.
NIDN. 0610077201

Anggota



Dr. Agung N. Jati, S.E., M.Si., M.Pd., Ak., CA.
NIDN. 0620017001

Sekretaris



Susyanti, S.E., M.Si.
NIDN. 0610048105

Anggota



Cahaya Nugrahani, S.E., M.Si.
NIDN. 0605017702

Disahkan oleh:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Psikologi



Dr. Arif Julianto S.N., S.E., M.Si.
NIDN/0610077201

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iswadi
NIM : 2122100020
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **"Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara di Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten"** adalah benar-benar karya peneliti sendiri dan bebas dari plagiat. Hal-hal yang bukan merupakan karya peneliti dalam skripsi ini telah diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini peneliti buat agar dapat dimaklumi dan digunakan sebagaimana perlunya.

Klaten,

Yang membuat pernyataan,



Iswadi

HALAMAN MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(QS. Al-Baqarah:286)

“Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya menemukanmu.”

(Ali bin Abi Thalib)

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja Lelah-lelah itu. Lebarakan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikanmu dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi gelombang-gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan.”

(Boy Candra)

“Orang lain tidak akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanyalah bagian *success stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada yang bertepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini, tetap berjuang!”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji syukur atas rahmat dan ridho Allah SWT, skripsi ini peneliti persembahkan kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bapak mertua tercinta, Bapak Drs. Warsono, M.Pd, yang selalu memberikan doa restu kepada peneliti.
2. Istri tercinta, Dewi Eka Purnamawati, S.E, M.M, yang selalu memberikan *support* baik materiil maupun spirituil dan doa, serta kasih sayang yang diberikan kepada peneliti.
3. Anak tercinta, Rayyan Ezzar Athala, semoga gelar ini memberikan motivasi kepada ananda. Semoga sholeh dan sukses selalu.
4. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten, Bapak Rudi Cahyono, S.ST, M.Si, yang sudah mengizinkan peneliti untuk melanjutkan pendidikan.
5. Kepala Sub Bagian Umum, Ibu Ir. Efiyanti Puspitorini, yang memberikan *support* dan motivasi, serta dukungan moral dan spiritual.
6. Analis Pengelola Keuangan Muda, Bapak Untung Kurniawa, S.ST, M.Si.
7. Analis Pengelola Keuangan Pertama, Ibu Nur Hidayah, S.Si.
8. Statistisi Pertama, Ibu Woro Indah Palupi, S.ST.
9. Statistisi Pertama, Adi Cahyono, S.ST.
10. Bendahara Pengeluaran, Ibu Tafianingsih, A.Md.
11. Mahasiswa magang Universitas Negeri Yogyakarta, Devika dan Nurul, yang membantu peneliti dalam menyusun skripsi.

12. Mahasiswa magang Politeknik Statistika STIS, Fitria, Wika, Chelsea, Innas, Tya, Fandi, dan Khrisna, yang membantu peneliti dalam menyusun skripsi.
13. Adik, Meliana Chandra Pancasari, S.Tr. yang telah memberikan *support* materiil kepada peneliti.
14. Mahasiswa magang Universitas Pembangunan Negeri Veteran Yogyakarta, Keysha, yang membantu peneliti dalam menyusun skripsi.
15. Teman-teman seperjuangan Progdi Non Reguler Akuntansi yang telah berjuang bersama-sama dalam meraih gelar sarjana di bangku kuliah.
Terima kasih atas kenangan yang terukir bersama.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya berupa kesehatan, kesabaran, kelancaran dan kekuatan. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Penatausahaan Barang Milik Negara Melalui Sensus Barang Milik Negara di Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten” sebagai syarat untuk mencapai gelar kesarjanaan pada program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widya Dharma Klaten.

Dalam proses pengerjaan tugas akhir ini, penulis mengalami banyak kendala, namun berkat ketekunan dan kerja keras ditambah dengan bantuan, bimbingan, kerjasama, dukungan, dan tentunya doa-doa terbaik yang selalu dipanjatkan dari berbagai pihak membuat kendala-kendala tersebut dapat dihadapi dan diselesaikan. Untuk itu dalam kesempatan kali ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Triyono, M.Pd., selaku Rektor Universitas Widya Dharma Klaten.
2. Bapak Dr. Arif Julianto Sri Nugroho, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Widya Dharma Klaten.
3. Bapak Dr. Agung Nugroho Jati, S.E., M.Si., M.Pd., Ak., CA., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Widya Dharma Klaten.
4. Ibu Cahaya Nugrahani, S.E., M.Si, selaku Dosen Pembimbing.
5. Ibu Susyanti, S.E., M.Si., selaku Sekretaris Tim Penguji.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	ix
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Landasan Teori	10
1. Teori Manajemen Aset	10
2. Teori <i>Stewardship</i>	13
3. Organisasi Sektor Publik	14
4. Pengertian Akuntansi Pemerintahan.....	155

5. Pengertian Barang Milik Negara	177
6. Penatausahaan Barang Milik Negara.....	188
7. Sensus Barang Milik Negara	19
8. Struktur Organisasi Barang Milik Negara.....	211
B. Hasil Penelitian yang Relevan	233
C. Kerangka Berfikir	29
BAB III METODE PENELITIAN	311
1. Desain Penelitian	311
2. Tempat dan Waktu Penelitian.....	322
3. Populasi dan Sampel Penelitian.....	322
4. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	333
5. Teknik Analisis Data	355
BAB IV HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN.....	433
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	433
1. Sejarah Berdirinya Badan Pusat Statistik	433
2. Logo Badan Pusat Statistik.....	466
3. Visi dan Misi Badan Pusat Statistik	47
4. Struktur Organisasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten.....	47
5. Fungsi dan Wewenang Badan Pusat Statistik.....	511
B. Hasil Penelitian.....	544
1. Reduksi Data	544
2. Penyajian Data.....	566
3. Verifikasi Data.....	58
C. Pembahasan	77
1. Pembukuan BMN pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten.....	77

2. Inventarisasi BMN pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten	78
3. Pelaporan BMN pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten	79
4. Pencatatan BMN melalui aplikasi SAKTI pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten	80
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	85
A. Simpulan.....	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Akuntansi BMN	23
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	29
Gambar 4.1 Logo Badan Pusat Statistik	46
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten.....	47

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Transkrip Wawancara

Lampiran 2 Laporan Barang Milik Negara Tahunan Tahun 2023

ABSTRAK

Iswadi, NIM 2122100020, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Psikologi Universitas Widya Dharma Klaten, Judul Skripsi: “Analisis Penatausahaan Barang Milik Negara Melalui Sensus Barang Milik Negara di Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten”.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis apakah PMK 181 Tahun 2016 tentang penatausahaan Barang Milik Negara sudah diterapkan di Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten, baik itu cara pembukuan, pencatatan, inventarisasi dan pelaporannya. Penelitian ini melibatkan narasumber secara langsung yaitu pengelola aset dan koordinator aset sehingga mendapatkan data yang akurat, transparan dan akuntabel. Metode analisis yang digunakan yaitu statistik deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Karena aset merupakan salah satu faktor penting penunjang laporan keuangan dan target pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan dalam menentukan opini.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penatausahaan Barang Milik Negara di Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (PMK 181 Tahun 2016). Walaupun ada beberapa kriteria yang belum dilaksanakan.

Kata Kunci: Kerja sama antara pengelola dan koordinator serta para pengguna aset di BPS Kabupaten Klaten merupakan faktor penting dalam pengelolaan aset.

ABSTRACT

Iswadi, NIM 2122100020, Accounting Study Program, Faculty of Economics and Psychology, Widya Dharma University, Klaten, Thesis title: "Analysis of the Administration of State Property through the Census of State Property at the Klaten Regency Central Statistics Agency."

The aim of this research is to test and analyze whether PMK 181 of 2016 concerning the administration of State Property has been implemented at the Klaten Regency Central Statistics Agency, including the method of bookkeeping, recording, inventory and reporting. This research directly involves resource persons, namely asset managers and asset coordinators, so as to obtain accurate, transparent and accountable data. The analytical method used is descriptive statistics in the form of written or spoken words from people and observable behavior. Because assets are one of the important factors supporting financial reports and audit targets from the Supreme Audit Agency in determining opinions.

The results of this research indicate that the administration of State Property at the Klaten Regency Central Statistics Agency is in accordance with applicable laws and regulations (PMK 181 of 2016). Although there are several criteria that have not been implemented.

Keywords: Collaboration between managers and coordinators as well as asset users at BPS Klaten Regency is an important factor in asset management

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Barang Milik Negara (BMN) merupakan aset negara yang perlu dikelola secara teratur dan penuh tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Amiri, 2015). Ruang lingkup penatausahaan BMN meliputi inventarisasi, pencatatan, pembukuan, dan pelaporan BMN. BMN dapat diperoleh dari hibah, pembelian, penyelesaian pembangunan, pelaksanaan dari perjanjian/kontrak, pembatalan, penghapusan, rampasan, reklasifikasi masuk dan transfer masuk. Objek penatausahaan BMN meliputi semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan semua barang yang diperoleh dari perolehan lainya yang sah yaitu hibah, perjanjian, Undang-Undang, dan putusan pengadilan. Sensus Barang Milik Negara merupakan salah satu instrumen penting dalam manajemen aset negara. BMN mencakup berbagai bentuk aset yang dimiliki oleh pemerintah seperti properti, kendaraan, peralatan, dan berbagai jenis barang milik negara lainnya. Pengelolaan sensus BMN yang efisien dan transparan menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa aset-aset ini dikelola dengan baik, meminimalkan risiko kehilangan atau kerusakan, serta memungkinkan pemerintah untuk mengoptimalkan penggunaannya.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap penatausahaan barang milik negara melalui sensus barang milik negara di BPS Kabupaten Klaten. Melalui analisis ini, diharapkan dapat diidentifikasi permasalahan yang ada, memberikan rekomendasi perbaikan, serta merumuskan strategi yang tepat untuk meningkatkan penatausahaan aset negara di tingkat daerah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan tata kelola barang milik negara, memperbaiki proses sensus barang milik negara, serta memberikan pemahaman yang lebih baik akan pentingnya data yang akurat dalam pengambilan keputusan pemerintah di Kabupaten Klaten. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016). Dalam pengertian lain, Penatausahaan BMN adalah rangkaian kegiatan yang meliputi inventarisasi, pembukuan, dan pelaporan BMN yang harus dicatat ke dalam daftar barang kuasa pengguna oleh kuasa pengguna barang (Dadang Suwanda, 2013:186). Meskipun penting, pengelolaan sensus BMN seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan. Faktor-faktor seperti kurangnya sistem informasi yang terintegrasi, kekurangan sumber daya manusia yang terlatih, kurangnya transparansi dalam proses pengelolaan, dan masalah hukum atau regulasi dapat menjadi hambatan dalam mencapai efisiensi dan transparansi yang diinginkan. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat efisiensi dalam pengelolaan sensus barang milik negara, seperti sumber daya manusia,

teknologi, atau kebijakan internal. Faktor yang bisa berpengaruh terhadap tingkat transparansi, termasuk mekanisme pelaporan, aksesibilitas informasi, dan keterlibatan masyarakat. mempengaruhi tingkat transparansi, termasuk mekanisme laporan, aksesibilitas informasi, dan keterlibatan masyarakat. Menyelidiki bagaimana tingkat efisiensi dan transparansi berkontribusi terhadap analisis penatausahaan barang milik negara melalui sensus BMN.

Pelayanan publik berkualitas dan berkelanjutan memerlukan informasi akurat dan dapat dipercaya tentang aset negara. Sensus BMN menjadi instrumen kunci dalam mendapatkan data yang diperlukan. Badan Pusat Statistik mempunyai misi menghasilkan data akurat, reliabel, dan transparan. Efisiensi dan transparansi pada pengelolaan sensus BMN merupakan hal yang krusial. Identifikasi karakteristik serta tantangan khusus yang dihadapi adalah pengelolaan sensus BMN di Kabupaten Klaten, termasuk potensi masalah administratif atau hambatan lokal.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis kualitatif tentang penatausahaan BMN melalui sensus BMN di Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini akan menggali wawasan mendalam dari para pemangku kepentingan terkait dengan permasalahan dan solusi potensial dalam pengelolaan sensus BMN. Penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan proses penatausahaan BMN meliputi inventarisasi, pencatatan, pembukuan, dan pelaporan melalui pelaksanaan sensus BMN di Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten.

Inventarisasi barang milik negara adalah proses pencatatan, pengelolaan, dan pemantauan terhadap semua aset atau barang yang dimiliki oleh pemerintah atau entitas publik. Tujuan dari inventarisasi barang milik negara adalah untuk mencatat, mengendalikan, dan mengelola aset-aset tersebut secara efisien. Dengan memiliki daftar inventaris yang akurat, pemerintah dapat melacak lokasi, kondisi, dan nilai dari setiap aset. Hal ini membantu dalam pengambilan keputusan, perencanaan anggaran, perawatan, dan pemeliharaan aset secara efektif. Inventarisasi barang milik negara juga dapat membantu mencegah kehilangan atau pencurian aset, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan kekayaan negara. Proses ini penting untuk menjaga transparansi dan integritas dalam administrasi pemerintah serta memastikan bahwa aset-aset tersebut dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Pencatatan barang milik negara merujuk pada kegiatan mencatat secara sistematis dan rinci mengenai semua aset atau barang yang dimiliki oleh pemerintah atau entitas publik. Pencatatan ini mencakup berbagai jenis aset, seperti properti tanah, bangunan, fasilitas, kendaraan, peralatan, dan barang inventaris lainnya yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah. Pencatatan barang milik negara melibatkan penggunaan sistem informasi dan prosedur yang terstruktur untuk memastikan bahwa data yang dicatat akurat, dapat diandalkan, dan mudah diakses. Ini juga sering melibatkan penggunaan teknologi informasi dan perangkat lunak khusus untuk manajemen aset guna meningkatkan efisiensi pencatatan dan pemantauan. Pencatatan yang baik

merupakan elemen kunci dalam manajemen aset yang efektif dan transparan di sektor publik.

Pembukuan barang milik negara adalah proses pencatatan secara rinci dan sistematis mengenai semua transaksi dan kegiatan yang terkait dengan aset atau barang yang dimiliki oleh pemerintah atau entitas publik. Pembukuan ini mencakup berbagai jenis aset, termasuk properti tanah, bangunan, fasilitas, kendaraan, peralatan, dan barang inventaris lainnya. Pembukuan barang milik negara melibatkan penggunaan prinsip akuntansi yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Pencatatan transaksi melibatkan penggunaan sistem informasi keuangan dan perangkat lunak akuntansi yang dapat mencatat dan melacak setiap transaksi yang terkait dengan aset negara. Prosedur pembukuan juga harus mematuhi peraturan dan kebijakan pemerintah terkait pengelolaan kekayaan negara. Hal ini mencakup penggunaan anggaran dengan tepat, pencatatan pembelian atau pengadaan baru, pemeliharaan, perbaikan, dan prosedur penghapusan aset yang sudah tidak terpakai atau rusak. Pembukuan barang milik negara menjadi bagian integral dalam sistem manajemen keuangan pemerintah dan memberikan dasar yang kuat untuk akuntabilitas, transparansi, dan pengelolaan yang efektif dari aset publik.

Pelaporan barang milik negara merujuk pada proses penyusunan dan penyampaian informasi yang berkaitan dengan aset atau barang yang dimiliki oleh pemerintah atau entitas publik kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pelaporan ini mencakup berbagai jenis aset, seperti properti tanah, bangunan, fasilitas, kendaraan, peralatan, dan barang inventaris lainnya. Pelaporan

barang milik negara umumnya melibatkan penyusunan laporan keuangan yang mencakup informasi mengenai aset, kewajiban, pendapatan, dan biaya terkait. Laporan keuangan ini harus mematuhi standar dan prinsip akuntansi yang berlaku serta regulasi keuangan yang berlaku di wilayah atau negara tersebut. Pada dasarnya, pelaporan bertujuan untuk memberikan informasi yang lengkap, jujur, dan terpercaya kepada pemangku kepentingan agar mereka dapat membuat keputusan yang informasional dan pemerintah atau entitas publik dapat dikelola dengan baik.

Salah satu contoh penelitian yang relevan dengan topik penelitian ini yaitu penelitian dari Puspitoarum, M (2016) terkait Analisis Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Pada Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan BMN pada BPS Kota Makassar masih kurang maksimal karena pengeluaran BMN yang tidak semuanya tercatat dalam kartu kendali, kodifikasi barang/label barang belum sesuai dengan PMK Nomor 29/PMK.6/2010 dan belum diperbaharui serta keterbatasan sumber daya manusia menjadi kendala dalam pelaksanaan pengelolaan BMN. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Puspitoarum, M (2016) adalah adanya kesamaan menganalisis topik terkait penatausahaan BMN yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Puspitoarum, M (2016) terletak pada instansi yang menjadi objek penelitian, sedangkan penelitian Setiadi (2018) menggunakan objek Kantor BPS Kota Makassar sedangkan peneliti menggunakan objek penelitian di Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten

Klaten. Penelitian tersebut menganalisis penghapusan BMN dan sudah mencantumkan persentase penilaian aset BPS Kota Makassar melalui diagram lingkaran sehingga memudahkan pembaca dalam memahami penelitian. Kekurangan penelitian tersebut yaitu belum mencantumkan proses pelaporan terhadap BMN yang dimiliki BPS Kota Makassar dan ruang lingkup penelitian yang masih belum luas.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi dan panduan bagi entitas pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan sensus BMN. Dengan demikian, mereka dapat bekerja menuju pencapaian penatausahaan aset yang baik, yang akan membuktikan komitmen mereka terhadap tata kelola aset negara yang baik dan akuntabel.

B. Batasan Masalah

Banyak hal yang menyebabkan masih banyak kendala dari pengelolaan sensus BMN. Berdasarkan identifikasi masalah, penulis memberikan batasan ruang lingkup dari penelitian yang akan dilakukan. Peneliti hanya membatasi permasalahan pada implementasi PMK Nomor 181 Tahun 2016 tentang penatausahaan barang milik negara di Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana analisis pencatatan, pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN di Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, rumusan masalah penelitian ini yaitu: Bagaimana proses penatausahaan BMN yang sesuai dengan PMK Nomor 181 Tahun 2016 di Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini yaitu: Untuk menganalisis implementasi PMK 181 tahun 2016 di Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya di bidang akuntansi sektor publik.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi instansi dalam mengambil keputusan. Selain itu dapat digunakan sebagai bahan informasi dan kajian untuk melakukan pengelolaan Sensus BMN di Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten secara efisien.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan masukan sekaligus pengetahuan untuk mengetahui gambaran kualitatif mengenai Analisis Penatausahaan

BMN Melalui Sensus BMN di Badan Pusat Statistik Kabupaten
Klaten.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Dari hasil analisis penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) pada satuan kerja BPS Kabupaten Klaten, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penatausahaan BMN tahap pembukuan dari 18 kriteria menurut PMK No. 181 Tahun 2016 pada BPS Kabupaten Klaten sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Pelaksanaan penatausahaan BMN tahap inventarisasi dari 11 kriteria yang ditetapkan menurut PMK No. 181 Tahun 2016 pada BPS Kabupaten Klaten telah memenuhi 9 kriteria. Yang belum dipenuhi oleh BPS Kabupaten Klaten yaitu tidak menyiapkan label sementara dan tidak menempelkan label registrasi sementara tetapi menggunakan label registrasi permanen.
3. Pelaksanaan penatausahaan BMN tahap pelaporan dari 11 kriteria menurut PMK No. 181 Tahun 2016 pada BPS Kabupaten Klaten sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Pelaksanaan pencatatan BMN melalui Aplikasi Sakti pada Badan Pusat Statistik pada tahap pencatatan dari 8 kriteria menurut PMK No. 181 Tahun 2016 pada BPS Kabupaten Klaten sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan teori *Stewardship*, pengelola BMN pada satuan kerja Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten telah bertanggung jawab dalam mengelola aset

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, transparan, dan akuntabel.

B. Saran

Untuk BPS Kabupaten Klaten dapat melakukan penatausahaan BMN lebih baik dan optimal, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan inventarisasi BMN BPS Kabupaten Klaten sebaiknya menyiapkan dan menempelkan label sementara yang akan ditempelkan pada BMN yang bersangkutan agar data semua BMN tersedia secara baik dalam upaya mewujudkan tertib administrasi dan tertib fisik.
2. Diharapkan satuan kerja BPS Kabupaten Klaten lebih teliti dalam menginput data BMN ke dalam aplikasi SAKTI BMN untuk mencegah kesalahan akibat human error.
3. BPS Kabupaten Klaten sebaiknya menambahkan pegawai pada bagian pengelola BMN, mengikuti pendidikan dan pelatihan tentang penatausahaan BMN melalui penggunaan aplikasi SAKTI BMN untuk meningkatkan kualitas kemampuan sumber daya manusia (SDM).
4. Untuk masa mendatang diharapkan BPS Kabupaten Klaten dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya dalam melaksanakan prosedur atau mekanisme penatausahaan BMN.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, P. (2018). Efektivitas Penatausahaan Aset Tetap dan Penerapannya Melalui Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi BMN (SIMAK BMN) Pada Universitas Sriwijaya, 1-134.
- Amiri, K. (2015). *Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Secara Akuntabel Menuju Good Governance*, Jurnal Potret Pemikiran, 2(20), 31-44.
- Asih, R. (2012). Analisis Pengelolaan Sensus Barang Milik Negara dan Perlakuannya Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah Studi Kasus di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember. 1-125.
- Elsye, Rosmery., dkk. (2016). **Dasar-Dasar Akuntansi Akrual Pemerintah Daerah**. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Ferawati. (2012). Analisis Penatausahaan Aset Tetap dan Penerapannya Melalui Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) Studi Kasus pada Satuan Kerja PPPTMGB “LEMIGAS”. Skripsi. Program Ekstensi Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Indonesia, Depok.
- Gubali, Martikawati., Tinangon, Jantje., & Pusung, Rudi. (2018). *Analisis Penatausahaan Barang Milik Negara Melalui Penggunaan Aplikasi SIMAK-BMN pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa*. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, 13(3), 216-224.
- Lukmaniyah, A. (2019). Analisis Penatausahaan Barang Milik Negara Melalui Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) Pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tegal. 1-94.
- Majampoh, Greise., Saerang, David P.E., & Suwetja, I Gede. (2017). *Evaluasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) pada Kantor Imigrasi Kelas II Tahunan*. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, 12(2), 681-693.
- Nugraheni, S., Maezaroh, & Fauziah, L. (2020). Penatausahaan Terkait Inventarisasi Barang Milik Daerah Sebagaimana Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah di Bidang Aset BPKAD Provinsi Jawa Tengah, 6(2), 2-19.
- Nuraeni, I., (2020). Pengaruh Pelayanan Bisnis dan Lingkungan Keluarga Terhadap Minat Berwirausaha Mahasiswa Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis UPI, 54-78.
- Nuryamin, S. (2018). *Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah Di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul Tahun 2014-2015*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, 1-20.

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 76 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/138973/pp-no-28-tahun-2020>.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Puspitoarum, M. (2016). *Analisis Pengelolaan BMN Pada Badan Pusat Statistik Kota Makasar*, Jurnal Administrative, 4(4), 229-241.
- Raharjo, E. (2017). *Teori Agensi dan Teori Stewardship Dalam Perspektif Akuntansi*, Jurnal Fokus Ekonomi, 1(2), 37-46.
- Saragih, Risma. (2017). *Efektivitas Kebijakan Penatausahaan Barang Milik Negara di Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan*. Jurnal Administrasi Publik, 7(1), 77-93.
- Setiadi, Ivan. (2018). *Analisis Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Donggala*. Jurnal Katalogis, 6(4), 10-20.
- Sri Wahyuni & Rifki Khoiorudin, **Pengantar Manajemen Aset**. (2020): Penerbit Nas Media Pustaka.
- Sugiyono. (2017). **Metode Penelitian Administrasi dilengkapi R&D**. Cetakan Kedua Puluh Lima. Bandung : Alfabeta.
- Suliyanto. (2006). **Metode Riset Bisnis**. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Aset Negara.
- Yusnita, N., & Setiadi, I. (2019). Analisis Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Donggala, 4(6), 10-20.
<https://ppid.bps.go.id/app/konten/0000/Profil-BPS.html>